

Judul : Atasi backlog perumahan, komisi V sarankan evaluaso konsep TOD
Tanggal : Jumat, 04 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Atasi Backlog Perumahan Komisi V Sarankan Evaluasi Konsep TOD



Teguh Iswara Suardi

ANGGOTA Komisi V DPR Teguh Iswara Suardi memandang konsep Transit Oriented Development (TOD) sangat potensial menyelesaikan berbagai persoalan perkotaan. Penerapan pola itu diharapkan berpotensi mengatasi backlog perumahan serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

DPR, kata Teguh, mendukung penuh agar konsep TOD bisa diterapkan serta diperluas di sejumlah lokasi. Namun, sebelum itu, pelaksanaan di lapangan perlu mendapat evaluasi menyeluruh mengingat penerapan kawasan terpadu ini sebenarnya sudah mulai berjalan sejak 2017.

Namun, sambung Teguh, hingga saat ini proyek baru terbangun di tiga lokasi. Di saat sama, ketiganya belum berjalan maksimal 100 persen sesuai rencana induk awal. Makanya, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan. "Ini agar pengembangan ke depan bisa berjalan secara efisien dan efektif," jelasnya, Senin (31/8/2026).

Contoh permasalahan terlihat di Stasiun Rawa Buntu, yakni tingkat okupansi hunian baru 60 persen dan hunian berimbang belum tercapai. Bangunan itu baru menyediakan segmen komersial, serta memicu kemacetan akibat belum ada *sky bridge*. Berbagai masalah ini harus diselesaikan sebelum memperluas kawasan hunian TOD.

Komisi V DPR mendorong pendalaman data para peng-

huni di lokasi TOD lain yang okupansinya telah mencapai 80 hingga 90 persen. Hunian khusus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) jangan sampai ditempati warga luar kota. Pengawasan itu diperlukan agar proyek perumahan betul-betul menyelesaikan backlog perumahan setempat.

Pemerincian data pengguna hunian khusus MBR harus diperiksa kembali secara detail oleh pihak terkait. Peningkatan itu dilakukan untuk memastikan program benar-benar mampu mengentaskan backlog Pemerintah daerah. Pembelian unit oleh para pendatang jangan sampai mendominasi karena tidak akan menyelesaikan permasalahan pemenuhan rumah lokal.

Direktorat Jenderal Integrasi Antarmoda Transportasi di Kementerian Perhubungan diharapkan dapat dilibatkan lebih jauh dalam pengembangan TOD. Kehadiran unit kerja baru itu diyakini mampu menyelesaikan masalah integrasi antarmoda secara komprehensif. Evaluasi menyeluruh tetap harus dilakukan agar pelaksanaan konsep ini berjalan jauh lebih efisien.

Sejalan dengan itu, anggota Komisi V DPR Erna Sari Dewi meminta konsep TOD menjamin aspek keselamatan dan aksesibilitas bagi penghuni rumah susun, termasuk penyandang disabilitas. Integrasi hunian dan transportasi dalam satu ekosistem wajib menjamin sistem keselamatan, dari hunian hingga akses menuju stasiun dan peron.

Erna menilai, penerapan konsep TOD tidak boleh hanya berorientasi pada keterhubungan infrastruktur hunian dan transportasi. Aspek keselamatan, termasuk ketersediaan jalur evakuasi dan akses keluar yang aman, juga wajib jadi bagian perencanaan kawasan terintegrasi. "Jangan sampai temanya terintegrasi, tapi keselamatannya justru tidak terintegrasi," tegasnya. ■ PYB